

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akuntansi, SAK ETAP, dan Sistem Akuntansi

1. Akuntansi

Dalam perkembangan dunia ekonomi sekarang ini peranan akuntansi sangat penting untuk suatu usaha agar dalam mengoperasikan kegiatan tidak mengalami kerugian. Kegiatan yang diterapkan oleh akuntansi dalam kegiatan ekonomi ini meliputi kegiatan mencatat, mengikhtisarkan, melaporkan, dan menginterpretasikan data dasar ekonomi untuk kepentingan perorangan, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat lain.

Pada umumnya pengertian akuntansi yang lebih mudah dipahami yaitu berasal dari "*American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)*" yang dikutip dalam buku Pengantar Akuntansi oleh Suhendar menyatakan bahwa, "Akuntansi merupakan suatu kegiatan atau proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, sejumlah transaksi keuangan yang terjadi pada suatu perusahaan dan melaporkan atau menyajikan serta mentafsirkan hasilnya.

Sementara menurut Alvin A. Arens yang dikutip dalam buku Pengantar Ilmu Akuntansi Keuangan untuk Ekonomi dan Teknik oleh Djahotman Purba dan Novdin M. Sianturi menjelaskan bahwa, Akuntansi yaitu suatu proses mencatat, mengklasifikasikan, dan mengikhtisarkan kegiatan ekonomi dengan cara yang logis dengan tujuan untuk

menyediakan informasi keuangan atau laporan keuangan sebagai pengambil keputusan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan suatu kegiatan mencatat, mengelompokkan, mengikhtisarkan pada setiap transaksi keuangan yang dilakukan secara sistematis dan kronologis disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang berguna bagi orang yang membutuhkan laporan keuangan untuk langkah pengambilan keputusan.

Kegiatan pencatatan tersebut dinamakan jurnal. Kegiatan pengelompokan merupakan pengklasifikasian akun pada buku besar yang disesuaikan dengan transaksi berdasarkan bukti transaksi. Sementara kegiatan pengikhtisaran yaitu rangkaian akhir proses menuju pembuatan laporan keuangan.

Akuntansi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang sangat diperlukan baik oleh pihak-pihak yang membutuhkan baik internal maupun eksternal. Biasanya hal ini penting dan berguna untuk para manajer perusahaan, karena akuntansi ini berguna dalam hal pengambilan keputusan perusahaan yang sangat penting untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut.

Hal ini sangat dibutuhkan bagi pengusaha karena untuk melihat posisi keuangan sampai dengan hasil yang dicapai oleh perusahaan. Bahkan investor dan kreditur pun juga membutuhkan akuntansi perusahaan yang akan bekerjasama terlebih dahulu dilakukan analisis untuk mengetahui apakah perusahaan ini menguntungkan atau merugikan. Contohnya untuk

mengetahui perkembangan perusahaan sendiri, untuk mengembangkan perusahaan, dan lain sebagainya.

2. SAK ETAP

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. SAK ETAP merupakan singkatan dari Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. SAK ETAP dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2009. Penerapan efektif pada penyusunan laporan keuangan yang dimulai setelah tanggal 1 Januari 2011. Entitas yang termasuk ETAP tetapi memilih menggunakan sak umum pada tahun 2011, maka entitas tersebut harus tetap menggunakan sak umum secara konsisten di periode selanjutnya. SAK ETAP digunakan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik dapat dirincikan sebagai berikut:

- a.** Tidak mempunyai akuntabilitas publik secara signifikan.
- b.** Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Pengguna eksternal merupakan pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemerintah kredit.

SAK ETAP muncul dengan tujuan sebagai solusi untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Perusahaan kecil dan menengah akan mampu untuk menyusun laporan keuangannya sendiri dan dapat diaudit, mendapatkan opini audit sehingga dapat memanfaatkan laporan keuangannya sebagai bentuk pengembangan usaha.

Badan usaha yang tergolong ke dalam entitas tanpa akuntabilitas publik diantaranya yaitu perorangan, persekutuan, firma, *Cimmanditaire Vetrnootschap* (CV), perseroan terbatas yang tidak mempunyai akuntabilitas publik yang signifikan, serta koperasi.

Laporan keuangan bertujuan untuk melengkapi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. SAK ETAP memiliki manfaat yaitu diantaranya:

- a. Diharapkan dengan adanya SAK ETAP perusahaan kecil dan menengah mampu menyusun laporan keuangan sendiri, dapat diaudit, dan mendapatkan opini audit sehingga dapat menggunakan laporan keuangannya untuk memperoleh dana untuk pengembangan usaha.
- b. Lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK IFRS sehingga lebih mudah dalam implementasinya.
- c. Tetap memberikan informasi yang andal dalam penyajian laporan keuangan.
- d. SAK ETAP terdiri dari 30 bab dan ditutup dengan daftar istilah.

Dalam hal ini laporan keuangan yang disajikan harus mampu memenuhi tujuan pelaporan keuangan yaitu:

- a. Memberikan informasi yang reliabel dan akuntabel mengenai posisi keuangan.

- b. Sebagai bahan untuk menilai kinerja.
- c. Sebagai dasar untuk mengambil keputusan.

Dalam memodelkan pencatatan dan pelaporan UMKM perlu dibuatkan metode pencatatan keuangan yang sederhana dan mudah dimengerti oleh UMKM. Meskipun demikian, pelaporan keuangan yang sederhana itu harus sesuai dengan kebutuhan UMKM untuk analisa internal, analisa pekerjaan, dan keperluan kredit.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu ditemukan bahwa kebutuhan UMKM tentang informasi keuangan ditentukan oleh volume usaha, hal ini menurut Wati yang dikutip dalam buku Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Nuramalia Hasanah, Saparuddin Muhtar, dan Indah Muliasari menemukan bahwa, omset usaha berpengaruh terhadap penerapan akuntansi.

Semakin besar omset suatu usaha maka semakin besar pula informasi yang dibutuhkan oleh usaha, sehingga semakin besar pula penerapan akuntansi dalam usaha tersebut.

Berdasarkan pendekatan dan informasi dasar akuntansi dalam UMKM dan pendekatan teori bahwa volume usaha berpengaruh terhadap akuntansi maka dibuatlah suatu formulasi kebutuhan pencatatan berdasarkan besaran usaha. Formulasi ini adalah tahapan kapan sebuah usaha membutuhkan pencatatan kas sederhana, kapan suatu perusahaan membutuhkan kartu hutang, kartu piutang, kartu gaji, dan kartu produksi, serta laporan keuangan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Formulasi ini berisikan level kebutuhan pencatatan, yaitu:



Gambar 2.1. Level Kebutuhan Pencatatan

Model untuk memformulasikan kebutuhan pencatatan dan metode keuangan sederhana UMKM dalam beberapa level yaitu diantaranya:

- a. Level 1 (Usaha Mikro), setiap usaha wajib dan harus mencatat kas masuk dan kas keluar. Dengan pencatatan sederhana, usaha mampu melakukan berbagai analisa seperti jumlah omset, total transaksi per hari, rekam jejak biaya produksi, pembayaran karyawan, dan sebagainya. Dasar ini ini memudahkan kebutuhan analisa internal, kebutuhan analisa kredit, dan kebutuhan pelaporan perpajakan.
- b. Level 2 (Usaha Mikro), menunjukkan transaksi khusus yang intensitasnya lebih tinggi dalam usaha. Transaksi ini menjadi penting karena merupakan bagian usaha yang tidak terpisahkan dan berkaitan langsung dengan ketersediaan kas. Transaksi yang memerlukan pencatatan khusus karena intensitasnya meningkat ialah penjualan, hutang, piutang, dan produksi.
- c. Level 3 (Usaha Kecil), penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi. Penyusunan laporan keuangan diperlukan

ketika volume usaha semakin meningkat dan besar. Kebutuhan analisa keuangan yang lebih kompleks dibutuhkan guna untuk menjelaskan kondisi usaha yang sesungguhnya.

- d. Level 4 (Usaha Menengah), penggunaan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP hanya diformulasikan untuk UMKM yang usahanya telah kompleks dan mampu menyediakan tenaga kerja khusus dalam bidang akuntansi, terlebih jika terdapat software akuntansi yang digunakan dalam usaha tersebut. Hal ini akan memudahkan usaha karena kebutuhan analisa internal tidak hanya analisa sederhana, tetapi jauh lebih kompleks guna untuk membuat usaha semakin efektif dan efisien.

Sistem akuntansi yang baik tidak hanya dinilai dari seberapa baik catatan disimpan tapi seberapa baik mampu memenuhi kebutuhan informasi dari para pembuat keputusan internal dan eksternal.

Tahap-tahap pelaksanaan pencatatan untuk memenuhi kebutuhan informasi yaitu diantaranya:

- a. Pencatatan transaksi

Pada tahap ini diharapkan pelaku entitas UMKM mengerti dan memahami pencatatan transaksi baik terutama bagi pelaku usaha sendiri maupun dalam hubungannya dengan pihak ketiga misalnya perizinan dan lembaga pembiayaan. Salah satu hambatan penerapan pelaksanaan pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan sederhana bagi UMKM adalah pandangan

bahwa kegiatan tersebut bukanlah kebutuhan bahkan dirasakan hanya menambah pekerjaan, manfaat yang diperoleh tidak sebanding dengan yang dilakukan. Perlu dilakukan sosialisasi mendalam pada tahap ini sehingga diharapkan Pada tahapan ini muncul kesadaran pelaku UMKM akan manfaat pentingnya pencatatan transaksi. Tahap awal ini adalah suatu hal yang penting sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Tahapan ini diharapkan mencapai entitas UMKM skala mikro.

b. Pencatatan kas

Pencatatan transaksi kas adalah dasar awal dari tahapan UMKM. Hal ini sejalan dengan bentuk kegiatan UMKM yang sebagian besar bersifat kas basis, baik modal, biaya, pembelian, maupun hasil penjualan. Pencatatan ini termasuk sumber utama informasi keuangan entitas. Pencatatan kas juga berguna bagi UMKM untuk mengetahui apakah terdapat kerugian atau laba serta Untuk mengetahui jumlah uang kas yang ada dalam kotak penyimpanan. Pencatatan ini dilakukan secara harian. Pada tahap ini diharapkan telah mencapai entitas UMKM skala mikro dan kecil.

c. Pencatatan transaksi lainnya

1) Pencatatan penjualan

Pencatatan penjualan dilakukan secara harian. Pencatatan ini diperlukan oleh entitas untuk mengetahui beberapa hal utama yaitu:

- a) Jumlah dari penjualan barang secara kredit
 - b) Barang-barang apa saja yang terjual
 - c) Siapa pembeli terbanyak
- 2) Pencatatan pembelian

Pencatatan pembelian diperlukan oleh entitas untuk mengetahui beberapa hal yaitu:

- a) Jumlah barang dagangan yang masih ada di gudang atau yang dititipkan outlet dengan sistem konsinyasi
- b) Apakah perlu dilakukan pembelian ulang
- c) Barang dagangan yang paling banyak diminati oleh pelanggan.

Dalam tahap ini diharapkan telah mencapai entitas UMKM skala mikro dan kecil.

d. Penyusunan laporan keuangan (Neraca dan Laba Rugi)

Dalam hal ini diasumsikan bahwa pencatatan transaksi telah mencakup seluruh aspek minimal dari neraca dan perhitungan laba rugi, dengan demikian dapat dikatakan bahwa entitas UMKM tersebut telah dapat melakukan konstruksi laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun masih dalam bentuk sederhana dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi standar. Dalam tahapan ini diharapkan mencapai oleh entitas UMKM skala mikro dan kecil.

e. Penyusunan laporan keuangan Lengkap berdasarkan SAK ETAP

Dalam hal ini entitas UMKM telah mempunyai seluruh catatan yang lengkap dan rinci tentang seluruh transaksi yang terjadi baik transaksi riil (pembelian, penjualan, retur, potongan harga, dan lain-lain) dan transaksi non riil (penyusutan, pencadangan, dan lain-lain).

Pencatatan ini mencakup seluruh aspek dalam neraca dan perhitungan laba rugi. Entitas juga telah memberlakukan prinsip-prinsip akuntansi dan perlakuan transaksi yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan. Secara organisasi juga diharapkan entitas mempunyai unit kerja tersendiri yang menangani seluruh kegiatan keuangan. Dalam tahap ini ini diharapkan telah mencapai oleh entitas UMKM skala menengah.

Agar UMKM memiliki kemampuan dan kemauan untuk mencatat transaksi keuangan yang dilakukan perlu dilakukan program pelatihan dan pendampingan kepada UMKM. Metode pencatatan *Single Entry* merupakan metode alternatif untuk pencatatan akuntansi secara sederhana untuk UMKM terutama usaha mikro dan kecil sebagai cara untuk mengisi kesenjangan pemahaman mengenai SAK ETAP yang belum dipahami oleh pelaku UMKM.

3. Sistem Akuntansi

Terdapat pengertian sistem akuntansi menurut beberapa ahli yang dikutip dalam buku Sistem Informasi Akuntansi oleh Faiz Zamzami, Nabella Duta Nusa, dan Ihda Arifin Faiz yaitu diantaranya:

- a. Menurut Warren, Reeve, dan Fess menjelaskan bahwa, sistem akuntansi sebagai suatu metode dan prosedur dalam mengumpulkan mengklarifikasikan, mengistisarkan, dan melaporkan informasi operasi dan keuangan suatu perusahaan.
- b. Menurut Mulyadi menjelaskan bahwa, sistem akuntansi dimanfaatkan sebagai organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan dan guna memudahkan pengelolaan perusahaan.
- c. Menurut Bussinessdictionary.com menjelaskan bahwa, sistem akuntansi diartikan sebagai seperangkat metode, prosedur, dan pengendalian akuntansi baik secara manual atau sistematis terkomputerisasi yang dikelola dalam pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, ringkasan, pemahaman, dan laporan data keuangan secara akurat dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan oleh manajemen.
- d. Menurut Settler mendefinisikan bahwa, sistem akuntansi merupakan berbagai macam formulir catatan, prosedur, dan alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan yang diperlukan oleh manajemen sebagai bentuk pengawasan usahanya dan berguna bagi berbagai pihak

yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan berbagai lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasional.

B. UMKM

1. Definisi UMKM

Usaha mikro kecil dan menengah adalah suatu bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini, usaha kecil dapat diartikan sebagai:

- a. Pengembangan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan seperti agrobisnis, industri manufaktur, sumber daya manusia, dan bisnis kelautan.
- b. Pengembangan kawasan andalan, untuk dapat mempercepat pemulihan perekonomian melalui pendekatan wilayah atau daerah dengan pemilihan wilayah atau daerah untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi.
- c. Peningkatan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat.

Menurut undang-undang Nomor 20 tahun 2008 mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung

dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Kriteria usaha mikro yaitu:

- 1) Mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00.

b. Kriteria usaha kecil yaitu:

- 1) Mempunyai kekayaan paling banyak Rp50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Mempunyai hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00.

c. Kriteria usaha menengah yaitu:

- 1) Mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan.
- 2) Mempunyai hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00.

Badan pusat statistik mengemukakan bahwa batasan usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu:

- a. Usaha mikro yaitu usaha yang mempunyai pekerja kurang dari 5 orang, termasuk tambahan anggota keluarga yang tidak dibayar.
- b. Usaha kecil yaitu usaha yang mempunyai pekerja 5 sampai 19 orang.

c. Usaha menengah yaitu usaha yang mempunyai pekerja 19 sampai 99 orang.

2. Ciri-Ciri UMKM

Menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 UMKM dapat berarti sebagai berikut:

a. Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan suatu usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI dan mempunyai hasil penjualan paling banyak 100 juta rupiah pertahun. Usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak 50 juta rupiah. Ciri-ciri usaha mikro yaitu sebagai berikut:

- 1) Jenis barang usahanya tidak selalu tetap, sehingga sewaktu-waktu dapat berubah.
- 2) Tempat usahanya tidak selalu menetap dan sewaktu-waktu dapat berpindah tempat.
- 3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- 4) Pengusaha atau SDM berpendidikan rata-rata sangat rendah, biasanya tingkat SD dan belum mempunyai kewirausahaan yang memadai.
- 5) Biasanya belum mengenal perbankan akan tetapi lebih mengenal rentenir.
- 6) Biasanya tidak mempunyai izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- 7) Tenaga kerja atau karyawan yang dimilikinya kurang dari 4 orang.

b. Usaha Kecil

Menurut undang-undang nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil yaitu usaha produktif yang berskala kecil dan mempunyai kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau mempunyai hasil penjualan paling 1 milyar rupiah pertahun serta dapat menerima kredit dari Bank di atas 50 juta sampai 500 juta rupiah. Ciri-ciri usaha kecil yaitu sebagai berikut:

- 1)SDM sudah lebih maju, rata-rata pendidikannya SMA dan sudah ada pengalaman usaha.
- 2)Pada umumnya sudah melakukan pembukuan atau manajemen keuangan walaupun masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga dan sudah membuat neraca usaha.
- 3)Pada umumnya sudah mempunyai izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- 4)Sebagian besar sudah berkaitan dengan perbankan, tetapi belum dapat membuat perencanaan bisnis, studi kelayakan, dan proposal kredit kepada bank. Sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultasi atau pendampingan tenaga kerja yang dipekerjakan antara 5 sampai 19 orang.

c. Usaha Menengah

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang usaha menengah yaitu suatu usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan bersih lebih besar dari 200 juta rupiah sampai dengan

paling banyak sebesar 10 milyar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Ciri-ciri usaha menengah yaitu:

- 1) Pada umumnya telah mempunyai manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, dan lebih modern dengan pembagian tugas yang jelas meliputi bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi.
- 2) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur. Sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian serta pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
- 3) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan, dan lain-lain.
- 4) Sudah mempunyai segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dan lain-lain.
- 5) Sudah akses kepada berbagai sumber pendanaan perbankan.
- 6) Biasanya sudah mempunyai SDM yang terlatih dan terdidik.

C. Perdagangan Agrobisnis

Agrobisnis merupakan bentuk kata baku dari agribisnis. Agrobisnis merupakan suatu sistem di mana keberhasilan agrobisnis sangat dipengaruhi oleh keberadaan berbagai komponen yang tersedia dalam sistem agrobisnis tersebut serta berbagai faktor lingkungan di sekelilingnya.

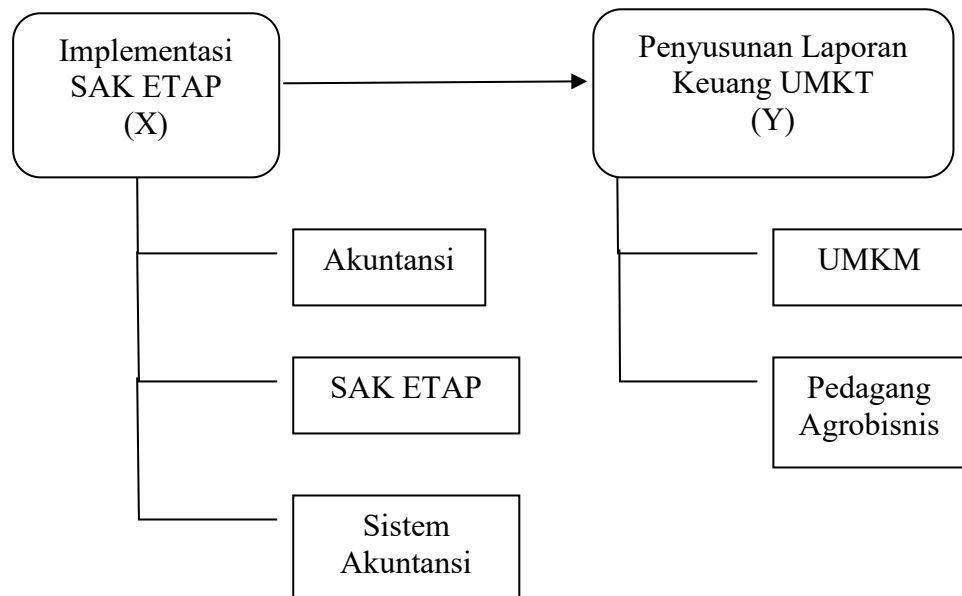
Maka dari itu sebelum melakukan usaha agrobisnis langkah pertama yang harus dilakukan oleh pedagang agrobisnis yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang memungkinkan dapat mempengaruhi keberhasilan usaha

agrobisnis yang akan dikembangkan pada suatu wilayah. Menurut J. Davis dan R. Goldberg yang dikutip dalam buku Manajemen Agribisnis oleh Achmad Faqih menjelaskan bahwa, agrobisnis digambarkan sebagai proses aliran secara vertikal yang bergerak mulai dari pengadaan sarana produksi, budidaya, pengolahan, pemasaran atau perdagangan, sampai dengan konsumen.

Dalam hal ini agrobisnis dipandang dari dua segi yaitu agrobisnis sebagai suatu sistem dan agrobisnis sebagai suatu bidang usaha. Menurut Davis dan Goldberg dalam Departemen Pertanian yang dikutip dalam buku Manajemen Agribisnis oleh Achmad Faqih menjelaskan bahwa, agrobisnis merupakan sejumlah total dari keseluruhan kegiatan yang melibatkan pembuatan dan penyaluran sarana usaha tani, kegiatan produksi di unit produksi, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi komoditas usaha tani dan berbagai produk yang dibuat dirinya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perdagangan agrobisnis merupakan suatu kegiatan kompleks yang terdiri dari lima subsistem diantaranya yaitu pasokan input, usaha tani, pasca panen dan pengolahan, pemasaran, dan jasa-jasa pendukung. Pedagang agrobisnis merupakan pelaku dari perdagangan agrobisnis.

D. Kerangka Penelitian



Gambar 2.2. Kerangka Penelitian